



## **PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DI KELURAHAN CIBABAT KECAMATAN CIMAHU UTARA KOTA CIMAHU**

**Ilfa Rismawati<sup>1)</sup>, Dahly Sukmapryandhika Ar<sup>2)</sup>, Siti Munawaroh<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### **Abstrak**

Judul penelitian ini "Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi". Masalah dalam penelitian ini belum efektifnya kesejahteraan sosial di Kelurahan Cibabat yang disebabkan oleh berbagai faktor. Identifikasi masalah bagaimana implementasi, efektivitas, dan seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan PKH terhadap efektivitas program kesejahteraan sosial. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi, efektivitas, dan seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan PKH terhadap efektivitas program kesejahteraan sosial. Teori implementasi kebijakan Grindle; 1) Isi kebijakan dan 2) Konteks implementasi. Teori efektivitas program Sutrisno; 1) Pemahaman program; 2) Tepat sasaran; 3) Tepat waktu; 4) Tercapainya tujuan; dan 5) Perubahan yang nyata. Tipe penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi berjumlah 795 orang dan sampel berjumlah 89 orang terdiri dari 89 masyarakat Kelurahan Cibabat sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, dan angket. Teknik pengolahan data menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian, pengaruh implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan sebesar 66,9% sedangkan terdapat pengaruh faktor lainnya adalah 33,1% yang ditunjukkan oleh indikator lain yang tidak diteliti. Hasil dari hipotesis alternatif (Ha) yaitu terdapat pengaruh signifikan antara pengaruh implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

**Kata Kunci:** Impelemntasi Kebijakan, PKH, Efektivitas Program, Kesejahteraan Sosial.

### **Abstract**

The title of this research is "The Effect of the Implementation of the Family Hope Program Policy on the Effectiveness of the Community Social Welfare Program in Cibabat Village, North Cimahi District, Cimahi City". The problem in this study is that social welfare in Cibabat Village has not been effective due to various factors. Identify problems with how to implement, effectively, and how much influence the implementation of PKH policies on the effectiveness of social welfare programs. The purpose of the research is to analyze and describe the implementation, effectiveness, and how much influence the implementation of PKH policies on the effectiveness of social welfare programs. Grindle's policy implementation theory; 1) The content of the policy and 2) The context of implementation. The theory of the effectiveness of the Sutrisno program; 1) Understanding of the program; 2) Right on target; 3) Punctual; 4) Achievement of goals; and 5) Tangible changes. The type of research uses a descriptive method with a quantitative approach. The population is 795 people and the sample is 89 people consisting of 89 people from Cibabat Village as PKH Beneficiary Families. Data collection techniques through literature studies, observations, and questionnaires. The data processing technique uses descriptive analysis techniques. The results of the study showed that the effect of the implementation of the Family Hope Program policy was 66.9% while there was an influence of other factors was 33.1% which was shown by other indicators that were not studied. The result of the alternative hypothesis ( $H_a$ ) is that there is a significant influence between the effect of the implementation of the Family Hope Program policy on the social welfare of the community in Cibabat Village, North Cimahi District, Cimahi City.

**Keywords:** Policy Implementation, PKH, Program Effectiveness, Sosial Welfare.

### **PENDAHULUAN**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan untuk merancang solusi yang tepat guna mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan implikasi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus pemerintahannya, dengan tujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Program Kelurahan Harapan (PKH) hadir sebagai salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. PKH ini merupakan program yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin agar lebih terencana dan terarah. Kemudian

diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu inisiatif yang diluncurkan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia dengan memberikan bantuan kepada keluarga miskin untuk mengurangi beban biaya dan meningkatkan pendapatan mereka. Dengan demikian, implementasi PKH di tingkat daerah adalah contoh nyata dari upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat kecil. PKH juga merupakan bantuan sosial yang dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi KPM agar menjadi lebih baik.

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi yang diharapkan oleh setiap individu dalam masyarakat dan menjadi tujuan yang perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat serta dukungan dari pemerintah. Dalam hal ini, pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) bersama dengan peran aktif para mitra terkait menjadi faktor kunci dalam keberhasilan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu bentuk upaya konkret pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya pada bidang kesehatan dan pendidikan. Sejak tahun 2016, program ini telah memperluas jangkauan layanannya dengan menyoar kelompok rentan lainnya, seperti lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas, terutama mereka yang mengalami disabilitas berat. Secara nyata, tingkat kemiskinan sebuah rumah tangga umumnya berkaitan erat dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang dimilikinya. Pendapatan yang sangat rendah pada keluarga miskin menyebabkan mereka kesulitan dalam mencukupi kebutuhan dasar, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, bahkan pada tingkat paling dasar sekalipun (Lestari, 2020).

Bantuan PKH terbagi menjadi dua jenis, diantaranya bantuan tetap dan bantuan komponen.

**Tabel 1.1**

**Besaran Dana Bantuan Tetap Program Keluarga Harapan**

No	Bantuan Tetap	Besaran Dana/Tahun
1.	Reguler	Rp. 550.000,-
2.	PKH Akses	Rp. 1.000.000,-

*Sumber: Kemensos Republik Indonesia*

**Tabel 1.2**

**Besaran Dana Bantuan Komponen Program Keluarga Harapan**

No	Bantuan Komponen	Besaran Dana/Tahun
1.	Ibu hamil	Rp. 2.400.000,-
2.	Anak usia dini	Rp. 2.400.000,-
3.	SD	Rp. 900.000,-
4.	SMP	Rp. 1.500.000,-
5.	SMA	Rp. 2.000.000,-
6.	Disabilitas berat	Rp. 2.400.000,-
7.	Lanjut usia	Rp. 2.400.000,-

*Sumber: Kemensos Republik Indonesia*

Selama ini, citra militer kerap kali mendominasi persepsi publik terhadap suatu wilayah, termasuk Kota Cimahi yang dikenal sebagai salah satu kota dengan latar belakang militer yang kuat. Namun, di balik citra tersebut, Kota Cimahi juga dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial yang kompleks, seperti tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kasus stunting pada anak, hingga persoalan korupsi yang masih terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Kota Cimahi belum sepenuhnya merata dan masih menyisakan tantangan serius di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif dan kebijakan yang responsif dari pemerintah untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut guna mendorong pertumbuhan kota yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. Salah satu upaya konkret yang telah dilakukan adalah melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH),

yang sejak tahun 2013 telah diimplementasikan secara serentak di seluruh 15 kelurahan di Kota Cimahi, termasuk di Kelurahan Cibabat, sebagai bagian dari strategi untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Adapun jumlah penerima manfaat yang sudah terlaksana di Kelurahan Cibabat adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.3**

**Data Keluarga Penerima Manfaat PKH Kelurahan Cibabat**

<b>Kelurahan</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Tahun</b>
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>PKH</b>	<b>PKH</b>	<b>PKH</b>	<b>PKH</b>
Cibabat	674	915	825	795

*Sumber: Dinas Sosial Kota Cimahi*

Berdasarkan data di atas, jumlah keluarga penerima bantuan PKH di Kelurahan Cibabat pada tahun 2021 tercatat sebanyak 674 keluarga, kemudian mengalami peningkatan menjadi 915 keluarga pada tahun 2022, yang mengindikasikan adanya kenaikan angka kemiskinan. Selanjutnya, terjadi penurunan jumlah penerima pada tahun 2023 menjadi 825 keluarga, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 795 keluarga. Fluktuasi jumlah penerima ini mencerminkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya berjalan secara efektif, karena masih terdapat ketidakkonsistenan dalam pencapaian tujuan program, khususnya dalam upaya menstabilkan dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan.

Dalam konteks implementasi Program Keluarga Harapan (PKH), meskipun isi kebijakan telah dirancang untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan pendidikan dan kesehatan, keberhasilan implementasi masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor seperti ketepatan sasaran, keterbatasan sarana prasarana yang menunjang untuk pertemuan kelompok setiap satu bulan sekali, serta lemahnya pemutakhiran data penerima manfaat menunjukkan bahwa konteks pelaksanaan belum optimal. Hal ini menjadi tantangan serius dalam menjamin efektivitas program, sehingga tujuan utama PKH untuk memutus

rantai kemiskinan belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih mendalam terhadap hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.

Selain itu, meskipun program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan adalah penetapan sasaran penerima bantuan yang dilakukan secara terpusat oleh BPS, yang masih sering menimbulkan ketidaktepatan sasaran. Selain itu, distribusi dana bantuan yang tidak sesuai jadwal menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat, yang belum sepenuhnya memahami mekanisme penyaluran. Tujuan PKH untuk meningkatkan taraf hidup dan mengurangi beban pengeluaran belum sepenuhnya tercapai, terutama di wilayah seperti Kelurahan Cibabat, di mana jumlah penerima manfaat masih fluktuatif akibat berbagai kendala tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas program PKH di daerah tersebut belum optimal dan perlu evaluasi lebih lanjut.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan, efektivitas program, dan mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan PKH terhadap efektivitas program kesejahteraan sosial. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2022:147) statistik deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul kemudian menyajikan hasil penelitian dalam bentuk angka atau statistik. Adapun instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu laptop, alat dokumentasi

berupa kamera *handphone*, alat tulis berupa pulpen dan buku catatan, dan seperangkat angket untuk mengukur efektivitas program kesejahteraan sosial masyarakat serta untuk mengukur pengaruh implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Populasi dalam penelitian ini adalah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang datanya didapat dari kantor Dinas Sosial Kota Cimahi berjumlah 795. Untuk menghitung jumlah sampel pada penelitian ini peneliti menggunakan Rumus Slovin dengan persentase kelonggaran yang ditoleransi sebesar 10% (0,1).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan sampel 10% (0,1)

Maka KPM PKH yang akan dijadikan sampel adalah berikut ini:

$$n = \frac{795}{1 + 795(0,1)^2}$$

$$n = \frac{795}{1 + 7,95}$$

$$n = \frac{795}{8,95}$$

$$n = 88,82 = 89$$

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebanyak 89 responden yang merupakan sebagai KPM PKH di Kelurahan Cibabat.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal akademik, serta memperoleh informasi tambahan yang mendukung dari berbagai situs web terpercaya di internet. Sementara itu, studi lapangan dilaksanakan dengan menyebarkan angket kepada para responden yang telah ditentukan, melakukan observasi langsung terhadap situasi dan kondisi di lokasi penelitian, serta mengumpulkan berbagai dokumen pendukung yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh data yang berhasil dikumpulkan

dari kedua teknik tersebut kemudian dianalisis secara kuantitatif menggunakan bantuan perangkat lunak *Microsoft Excel* untuk proses tabulasi data dan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) versi 27 untuk melakukan uji statistik terhadap data yang diperoleh.

## **PEMBAHASAN**

### **Implementasi Kebijakan**

Menurut Subarsono (dalam Aslinda, 2023) implementasi kebijakan publik adalah studi tentang bagaimana kebijakan dijalankan oleh pemerintah. Setelah suatu kebijakan dikembangkan dan disetujui, langkah selanjutnya adalah menentukan dan memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Ini menekankan pada pentingnya memastikan bahwa kebijakan yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

### **Program Keluarga Harapan (PKH)**

Definisi PKH berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

“Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH”.

### **Efektivitas Program**

Menurut Gibson (dalam Setiawan, 2022) efektivitas adalah tercapainya tujuan dan sasaran yang disepakati bersama dalam suatu organisasi. Tingkat efisiensi dan efektivitas suatu organisasi dipengaruhi oleh perilaku manajemen organisasi tersebut.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Efektivitas Program Kesejahteraan Sosial Masyarakat di Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi”. Pada pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

dengan dua variabel utama, yaitu variabel independen berupa implementasi kebijakan (X) dan variabel dependen berupa efektivitas program (Y). Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 89 responden yang merupakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan atau implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH), bagaimana efektivitas program kesejahteraan sosial yang berjalan, serta seberapa besar pengaruh implementasi kebijakan PKH terhadap efektivitas program kesejahteraan sosial di lingkungan masyarakat Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Setelah data diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan dilakukan proses pengolahan serta analisis data secara sistematis, peneliti berhasil menemukan sejumlah temuan penting yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Temuan-temuan tersebut menjadi dasar utama dalam menjawab pertanyaan penelitian serta dalam menguji kebenaran hipotesis yang telah diajukan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Menurut Sugiyono (2022:93), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena sosial. Dalam penerapannya, variabel yang akan diteliti dijabarkan terlebih dahulu ke dalam beberapa indikator, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyusun item-item instrumen dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Pada penelitian ini, digunakan skala Likert dengan lima tingkatan penilaian, yaitu Sangat Setuju (SS) dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Kurang Setuju (KS) dengan skor 3, Tidak Setuju (TS) dengan skor 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan skor 1. Setiap skor mencerminkan tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang diberikan, di mana semakin tinggi skor menunjukkan tingkat persetujuan yang semakin kuat. Skala ini memudahkan peneliti dalam mengkuantifikasi opini responden dan mengolahnya secara statistik untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif.

**Tabel 3.1**  
**Tanggapan responden terhadap item indikator Variabel Implementasi**  
**Kebijakan**

No	Indikator	Skor Jawaban										Skor	Rata-rata
		5		4		3		2		1			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Kegunaan program	65	73%	24	27%	0	0%	0	0%	0	0%	421	4,73
2.	Mekanisme pelaksanaan program	46	52%	42	47%	1	1%	0	0%	0	0%	398	4,47
3.	Pengaruh adanya program	54	61%	32	36%	3	3%	0	0%	0	0%	407	4,57
4.	Manfaat program dalam bidang Pendidikan	45	51%	43	48%	1	1%	0	0%	0	0%	400	4,49
5.	Manfaat program dalam bidang Kesehatan	41	46%	46	52%	2	2%	0	0%	0	0%	395	4,52
6.	Manfaat program dalam bidang kesejahteraan sosial	48	54%	40	45%	1	1%	0	0%	0	0%	403	4,52
7.	Tujuan jangka pendek PKH	28	31%	39	44%	20	22%	1	1%	1	1%	359	4,03
8.	Tujuan jangka	51	57%	37	42%	0	0%	0	0%	1	1%	412	4,62

	panjang PKH												
9.	Keputusan pemerintah terhadap program PKH	50	56%	38	43%	1	1%	0	0%	0	0%	405	4,55
10.	Pemahaman kebijakan program oleh pendamping PKH	26	29%	63	71%	0	0%	0	0%	0	0%	382	4,29
11.	SDM yang membantu pelaksanaan PKH	64	72%	25	28%	0	0%	0	0%	0	0%	420	4,71
12.	Sarana dan prasarana yang menunjang untuk pertemuan kelompok PKH	40	45%	47	53%	2	2%	0	0%	0	0%	394	4,42
13.	Sosialisasi program kepada Masyarakat	44	49%	45	51%	0	0%	0	0%	0	0%	400	4,49
14.	Tanggung jawab pelaksana program	57	64%	32	36%	0	0%	0	0%	0	0%	413	4,64
15.	Penyediaan layanan	38	43%	41	46%	10	11%	0	0%	0	0%	384	4,31

	sistem pengaduan masyarakat												
16.	Respon pendamping PKH	56	63%	33	37%	0	0%	0	0%	0	0%	412	4,62
17.	Penyaluran informasi kepada Masyarakat oleh pendamping PKH	67	75%	22	25%	0	0%	0	0%	0	0%	423	4,75
	Rata-rata												4,51

*Sumber: Olah Data Peneliti, 2024*

Berdasarkan hasil pengolahan data, variabel implementasi kebijakan memperoleh skor rata-rata sebesar 4,51 yang termasuk dalam kategori sangat baik. Meskipun demikian, terdapat satu indikator dengan skor terendah, yaitu terkait tujuan jangka pendek Program Keluarga Harapan (PKH), khususnya pada pernyataan bahwa PKH dapat membantu meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum implementasi kebijakan dinilai sangat baik, masih terdapat keraguan atau ketidakyakinan dari responden terhadap implementasi kebijakan PKH dalam meningkatkan taraf hidup KPM dalam jangka pendek. Meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir, namun pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara signifikan, khususnya dalam aspek kemandirian ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar yang berkelanjutan. Selain itu, penyediaan layanan sistem pengaduan masyarakat dalam program PKH belum dapat diakses secara optimal oleh KPM karena sebagian besar dari mereka tidak memahami cara mengakses layanan tersebut.

**Tabel 3.2**  
**Tanggapan responden terhadap item indikator Variabel**  
**Efektivitas Program**

No	Indikator	Skor Jawaban										Skor	Rata-rata
		5		4		3		2		1			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1.	Pemanfaatan dana bantuan	54	61%	35	39%	0	0%	0	0%	0	0%	410	4,59
2.	Pendampingan	41	46%	48	54%	0	0%	0	0%	0	0%	397	4,46
3.	Pertemuan kelompok PKH	58	65%	31	35%	0	0%	0	0%	0	0%	414	4,65
4.	Ketepatan kriteria penerima bantuan	33	37%	43	48%	12	13%	1	1%	0	0%	375	4,21
5.	Kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat	34	38%	47	53%	8	9%	0	0%	0	0%	382	4,29
6.	Kesesuaian program dengan harapan masyarakat	34	38%	51	57%	4	4%	0	0%	0	0%	386	4,33
7.	Ketepatan waktu penyaluran dana bantuan	35	39%	47	53%	7	8%	0	0%	0	0%	384	4,31
8.	Ketepatan waktu pertemuan	43	48%	42	47%	4	4%	0	0%	0	0%	395	4,43

	kelompok												
9.	PKH meningkatkan taraf hidup masyarakat	38	43%	40	45%	11	12%	0	0%	0	0%	383	4,29
10.	PKH mengurangi beban pengeluaran masyarakat	40	45%	43	48%	6	7%	0	0%	0	0%	390	4,38
11.	PKH meningkatkan pendapatan masyarakat	27	30%	44	49%	18	20%	0	0%	0	0%	365	4,09
12.	Perubahan kondisi sosial ekonomi	34	38%	54	61%	1	1%	0	0%	0	0%	389	4,37
13.	Keberhasilan program	28	31%	58	65%	3	3%	0	0%	0	0%	381	4,28
	Rata-rata												4,36

*Sumber: Olah Data Peneliti, 2024*

Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa variabel efektivitas program memperoleh skor rata-rata sebesar 4,36 yang tergolong dalam kategori sangat baik. Namun, terdapat indikator dengan skor terendah, yaitu terkait ketepatan kriteria penerima bantuan. Meskipun secara keseluruhan program dinilai efektif, masih ada keraguan dari responden mengenai ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan PKH, yang berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial. Selain itu, terdapat indikator lain dengan skor rendah yang berkaitan dengan pernyataan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sebagian responden belum sepenuhnya merasakan dampak langsung dari program ini terhadap peningkatan

pendapatan mereka, sehingga efektivitas PKH dalam aspek pemberdayaan ekonomi perlu ditingkatkan agar tujuan program dapat tercapai merata.

Berikut ini adalah gambar dari hasil uji hipotesis secara parsial (uji t).

**Tabel 3.3**

**Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Secara Parsial (Uji T)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,168	5,854		2,420	0,018
	Implementasi Kebijakan	0,555	0,076	0,818	7,288	0,000

a. Dependent Variable: Efektivitas Program

*Sumber: Olah Data Peneliti, 2024*

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) nilai signifikansi dari output data penelitian ini adalah 0,000 dan nilai t-hitung sebesar 7,288 menunjukkan bahwa nilai signifikansinya  $0,000 < 0,05$  dan  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $7,288 > 1,987$ ). Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa “Implementasi Kebijakan Berpengaruh Signifikan Terhadap Efektivitas Program.” Artinya semakin tinggi implementasi kebijakan maka efektivitas program juga akan meningkat.

Adapun hasil analisis koefisien determinasi adalah sebagai berikut.

**Tabel 3.4**

**Tabel Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.818 <sup>a</sup>	.669	.666	1.794	1.902

a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan

b. Dependent Variable: Y

*Sumber: Olah Data Peneliti, 2024*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi dalam analisis regresi linear sederhana, diperoleh nilai R Square sebesar 0,669. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel implementasi kebijakan (X) memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap variabel efektivitas program (Y), yaitu sebesar 66,9%. Artinya, sekitar 66,9% variasi atau perubahan yang terjadi pada efektivitas program dapat dijelaskan oleh implementasi kebijakan yang diterapkan. Dengan kata lain, semakin baik implementasi kebijakan dilakukan, maka semakin tinggi pula efektivitas program yang dicapai. Sementara itu, sisanya sebesar 33,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar implementasi kebijakan yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap tingkat efektivitas program yang dijalankan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan yang telah dirumuskan mampu diterapkan secara tepat dan konsisten di lapangan. Dengan kata lain, sebagian besar variasi atau perbedaan dalam efektivitas program dapat dijelaskan oleh kualitas dan keberhasilan proses implementasi kebijakan tersebut.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan pengaruh positif terhadap efektivitas program kesejahteraan sosial di Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, seperti kurang tepatnya sasaran penerima bantuan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta layanan pengaduan masyarakat yang belum dapat diakses secara optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa setiap peningkatan implementasi kebijakan PKH akan diikuti oleh peningkatan efektivitas program kesejahteraan sosial, di mana peningkatan satu persen dalam pelaksanaan kebijakan diperkirakan mampu mendorong peningkatan efektivitas program sebesar 0,818 persen. Secara keseluruhan, implementasi kebijakan memberikan pengaruh terhadap efektivitas program sebesar 66,9%, sementara sisanya sebesar 31,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Meskipun implementasi kebijakan PKH menunjukkan arah yang positif, program ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari belum meratanya dampak positif yang dirasakan oleh seluruh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga tujuan

utama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan belum tercapai secara optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Aslinda. (2023). *Model Kebijakan Publik dan Teori Perubahan Kebijakan*. Yogyakarta: K-Media.

Setiawan, Daniel et al (2022). *Determinan Efektivitas Kemampuan Militer*. Indramayu: CV Adanu Abimata

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

### **Jurnal**

Lestari, Rohana Widhi dan Abu Talkah. 2020. Analisis Pengaruh Banuan Sosial PKH Terhadap Kesejahteraan Masyarakat PKH di Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar. *Jurnal Ilmu Manajemen* 9(2).

### **Dokumen**

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia. 2018. *Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan*.